



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



Pangkalpinang
kota beribu
senyuman

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat.

Good governance yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkenaan dengan itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu

diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan setelah melalui proses panjang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Beranjak dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama 2018-2023.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra dan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ini yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Daerah dan jajarannya kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2022.

1.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah

1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Pangkalpinang.

Mengacu pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kota;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Pemerintah Kota;
- e. pengoordinasian pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah, dibantu dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah :

a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bagian Hukum.

b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan; serta
3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.

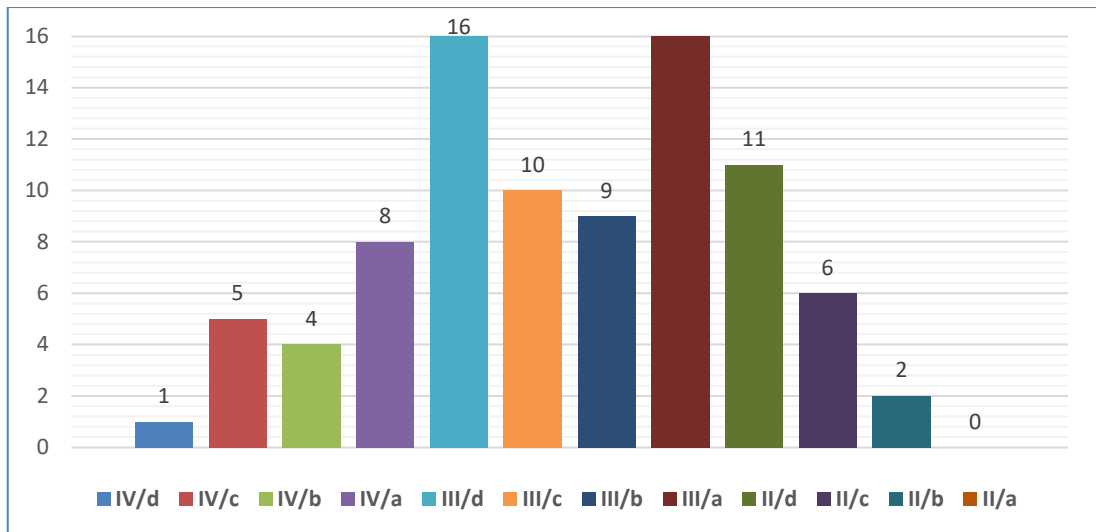
c) Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Organisasi; serta
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

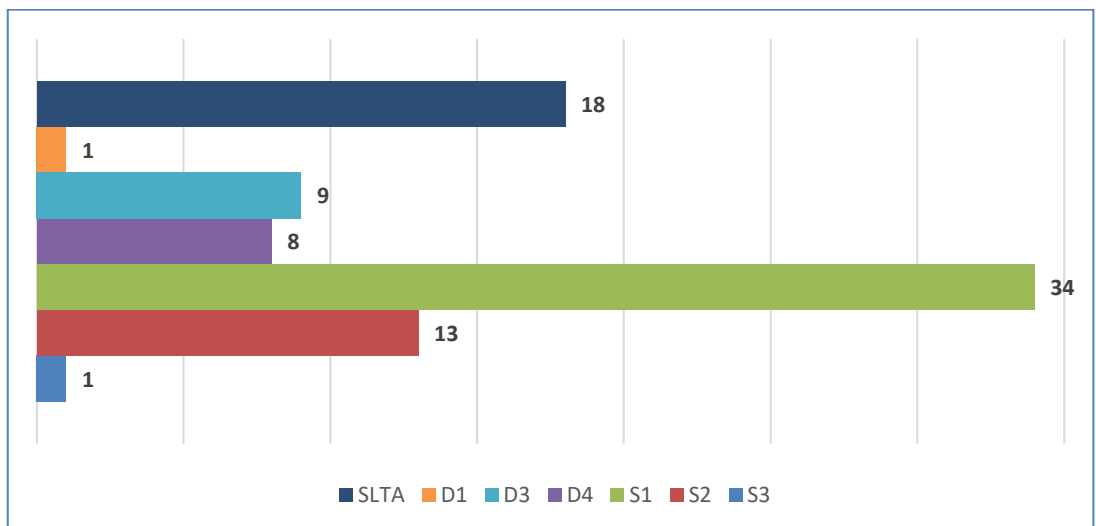
1.2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Kondisi eksisting aparatur di lingkungan Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

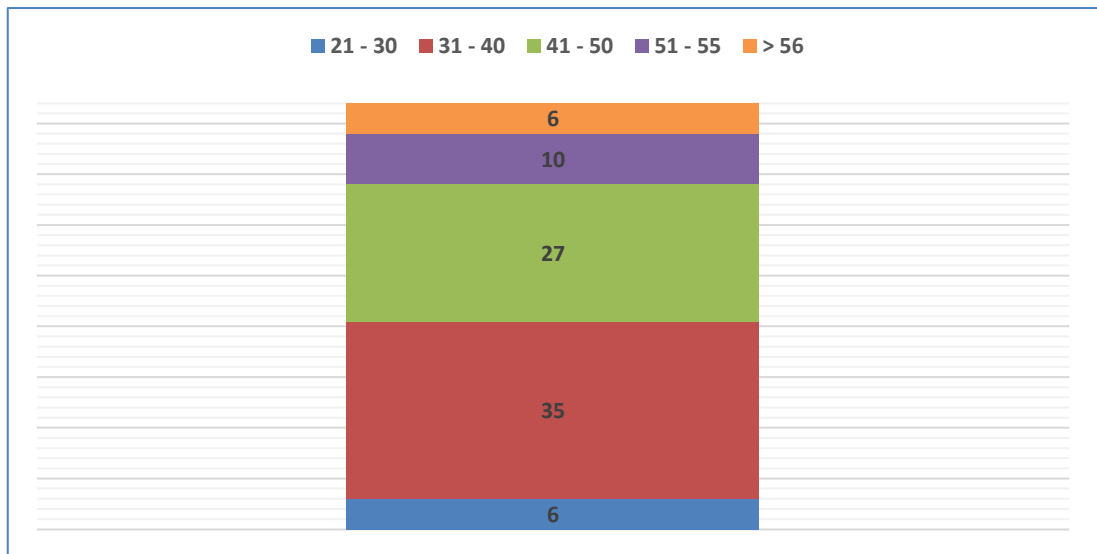
a. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang



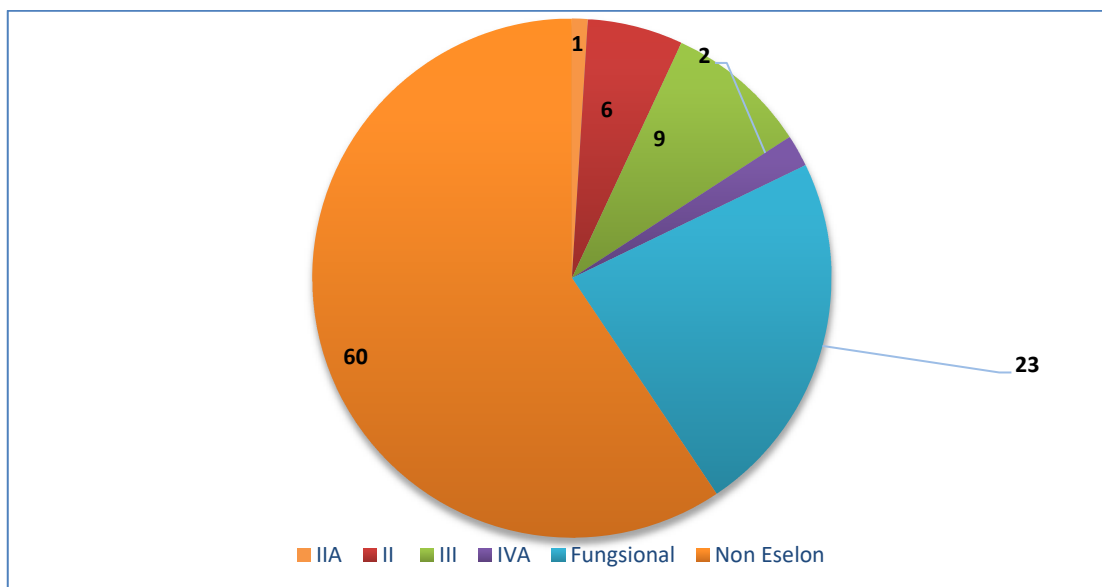
b. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



c. Jumlah PNS Berdasarkan Usia



d. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkatan Eselonering



Sumber : Bagian Umum Setda Kota Pangkalpinang

1.3 Aspek Strategis

Dalam memenuhi amanat dan cita-cita pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang secara mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Target pembangunan dimaksud diterjemahkan kembali dalam dokumen perencanaan di masing-masing satuan kerja melalui Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk selanjutnya diuraikan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan untuk dapat menyusun 4 strategi, yaitu :

- a. strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

- b. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- c. strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; dan
- d. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Berdasarkan analisis SWOT dengan mempertimbangkan isu strategis ditetapkan faktor keberhasilan yaitu kondisi yang harus ada sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap lingkungan organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: :

Lingkungan Internal :

1. Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan Sekretariat Daerah antara lain :

- a. adanya visi dan misi yang jelas;
- b. adanya program yang jelas;
- c. adanya peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah serta peraturan daerah yang mendukung;
- d. adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- e. adanya motivasi, inisiatif, dan kreativitas aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas;
- b. terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
- c. belum adanya aplikasi sistem informasi di bidang pelayanan informasi yang dimiliki;
- d. masih lemahnya koordinasi dengan satuan kerja lain;

- e. Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan Pemerintah Kota;
- f. Budaya kerja yang belum sistematis;
- g. Tata kerja dan tata kelola yang belum tertib;
- h. Masih rendahnya kualitas pelayanan; dan
- i. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi.

Lingkungan Eksternal :

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. adanya kerjasama antar daerah;
- b. adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat;
- c. adanya kerjasama yang baik dengan pihak legislatif; dan
- d. adanya kepercayaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur;
- b. bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat, yang mempengaruhi daya serap terhadap informasi;
- c. masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur dalam bidang pelayanan; dan
- d. adanya krisis ekonomi dan globalisasi yang tidak menentu.

1.4 Isu Strategis

Dalam rangka menuju *good governance*, isu strategis yang berkembang saat ini adalah pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Organisasi publik (pemerintah) pada dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung.

Posisi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan suatu pelayanan masih disalah artikan oleh bagian pengelola pelayanan publik, sehingga aparatur cenderung menganggap masyarakat sebagai orang yang harus melayani, bukan yang harus dilayani. Disisi lain masih lemahnya kontrol yang tegas dari pemerintah atas tindakan-tindakan pelayanan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) Bagian akan tetapi walaupun tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, Sekretariat Daerah berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja aparatur dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan isu permasalahan strategis yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota pangkalpinang, meliputi :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pusat pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- c. Masih terbatasnya kuantitas dan kompetensi pegawai terkait tugas dan fungsi di masing-masing bagian karena kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM belum menjadi prioritas.
- d. Banyaknya kebijakan yang tumpang tindih di tingkat pusat sehingga menyebabkan kerancuan dalam penerapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- e. Peningkatan kualitas koordinasi dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pangkalpinang serta akuntabilitas keuangan yang berisi analisis keuangan daerah pada tahun tersebut. Aspek pendukung lainnya berisi kondisi sumber daya manusia, aset daerah, dan sebagainya serta tindak lanjut hasil Evaluasi tahun lalu yang berisi perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN/BPKP .

BAB IV PENUTUP

Menggambarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut, Permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Kota Pangkalpinang

Berdasarkan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Visi Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 adalah sebagaimana mengacu kepada Visi Kepala Daerah Kota Pangkalpinang yaitu **“Mewujudkan Pangkalpinang Sebagai Kota SENYUM”**. Sedangkan misi Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

2.2 Misi Kota Pangkalpinang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang **mengarah pada pencapaian unsur visi : Unggul**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yaitu misi ke-3 yaitu: **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*”**, dengan tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
					2018	2021	2022	2023
Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD	Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Nilai	3,2718	3,2721	3,2722	3,2723
		Nilai AKIP	Hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.	Nilai	61,73	63,30	65,50	67,70
	Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu DIBAGI Jumlah seluruh PD DIKALI 100	%	NA	85	90	95

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dengan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 tercantum pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

- Visi** : Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota **SENYUM**
(SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL MAKMUR)
- Misi** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*
- Tujuan** : Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah
- Sasaran** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022	2023
Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang	Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Meningkatkan kualitas penyusunan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi data dalam penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	√	√

2.4 Rencana Kinerja

2.4.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Nomor 157/KEP/BAG.ADPEM/IX/2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing sub unit kerja di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 dalam upaya merancang berbagai rencana aksi dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (kinerja). Adapun IKU Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2018-2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2021	2022	2023				2021	2022	2023
Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,2721	3,2722	3,2723	Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	%	85	90	95
	Nilai AKIP	Nilai	63,30	65,50	67,70						

2.4.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang berupa pernyataan komitmen oleh pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, hal ini sangat penting karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar reevaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pengembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022, sebagai berikut :

TABEL 2.1

**Matrik Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD	Nilai	3,2722
			Nilai AKIP	Nilai	65,50
		Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	%	90

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang melaksanakan 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan besaran anggaran atau belanja langsung yakni sebesar 47.845.628.624,- (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*). Sementara Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang melaksanakan 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan dengan besaran anggaran atau belanja langsung yakni sebesar 52.201.302.264,- (*lima puluh dua milyar dua ratus satu juta tiga ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*). Dengan perjanjian kinerja terlampir dalam laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2022 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2018-2023.

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **formulir Pengukuran Kinerja**.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *core area* Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta sasaran RPJMD 2018-2023.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN, Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun Kerangka pengukuran kinerja yang berdasar pada Keputusan Kepala LAN, Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	>100 %	Baik Sekali	
2	75 % s.d. 100 %	Baik	
3	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4	< 55 %	Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang diuraikan dalam 5 (lima) indikator kinerja utama, terdapat 1 (satu) indikator sudah sesuai target dan 3 (tiga) indikator yang belum keluar hasil penilaiannya serta 1 (satu) indikator belum sesuai capaian. Secara umum hal ini menggambarkan capaian yang cukup dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2022. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada analisis capaian kinerja selanjutnya.

Hingga akhir tahun 2022, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah menjadi tanggungjawab. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran, dapat dilihat pada penjelasan berikut.

➤ Tujuan

“Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang akuntabel dan tepat waktu”

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Tujuan

Indikator	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	
Nilai LPPD	NA	3,2721	NA*	0 %	3,2723
Nilai AKIP	62,53	63,30	NA*	0 %	67,70

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran ini pada tahun 2022 belum rilis baik penilaian LPPD dan AKIP sehingga data belum bisa disampaikan.

❖ **Sasaran 1**

“Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang akuntabel dan tepat waktu”

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran

Indikator	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	88,23%	90 %	75 %	90,12 %	95 %

Laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu merupakan suatu proses penyusunan laporan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah dan merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan.

Capain kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang Baik. Target yang ditetapkan adalah persentase PD yang

menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu dengan capaian adalah 75 % dari target yang telah ditetapkan 85 %, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 90,12 %, atau bernilai **Baik**.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 melaksanakan program dan kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Keuangan Pendukung Pencapaian Sasaran

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI Rp
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.800.567.550,00	13.884.129.527,00
Administrasi Tata Pemerintahan	150.850.000,00	100.975.001,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	67.200.000,00	66.900.001,00
BELANJA OPERASI	67.200.000,00	66.900.001,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>67.200.000,00</i>	<i>66.900.001,00</i>
Belanja Barang	39.300.000,00	39.000.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	39.300.000,00	39.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.800.000,00	38.800.000,00
Belanja Jasa	27.900.000,00	27.900.001,00
Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00	27.900.001,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.900.000,00	27.900.001,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	14.000.000,00	3.375.000,00
BELANJA OPERASI	14.000.000,00	3.375.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>3.375.000,00</i>
Belanja Barang	9.000.000,00	3.375.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	3.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000,00	3.375.000,00
Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	0,00

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	69.650.000,00	30.700.000,00
BELANJA OPERASI	69.650.000,00	30.700.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>69.650.000,00</i>	<i>30.700.000,00</i>
Belanja Barang	20.350.000,00	15.500.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	20.350.000,00	15.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.850.000,00	11.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	3.750.000,00
Belanja Jasa	37.300.000,00	15.200.000,00
Belanja Jasa Kantor	37.300.000,00	15.200.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.300.000,00	15.200.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	0,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.436.647.550,00	12.806.456.476,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12.402.301.750,00	10.953.994.476,00
BELANJA OPERASI	12.320.880.950,00	10.889.094.476,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>12.320.880.950,00</i>	<i>10.889.094.476,00</i>
Belanja Barang	851.108.150,00	697.804.500,00
Belanja Barang Pakai Habis	851.108.150,00	697.804.500,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.000.000,00	19.934.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.495.000,00	12.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.134.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.750,00	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.000.000,00	11.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	189.420.000,00	186.120.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	359.375.000,00	277.200.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	191.400.000,00	190.400.000,00
Belanja Jasa	10.009.872.800,00	9.015.050.000,00

Belanja Jasa Kantor	9.820.372.800,00	8.922.550.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.990.700.000,00	1.550.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.943.200.000,00	6.591.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	413.472.800,00	316.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	324.000.000,00	324.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	120.000.000,00	120.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Penambahan Daya	9.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	98.000.000,00	92.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.500.000,00	24.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	61.500.000,00	56.000.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	91.500.000,00	0,00
Belanja Sewa Hotel	91.500.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	892.500.000,00	753.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	892.500.000,00	753.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.500.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	776.000.000,00	753.150.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	567.400.000,00	423.089.976,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	567.400.000,00	423.089.976,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	567.400.000,00	423.089.976,00
BELANJA MODAL	81.420.800,00	64.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.420.800,00	64.900.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	81.420.800,00	64.900.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	66.420.800,00	64.900.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.420.800,00	64.900.000,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.999.644.800,00	1.825.962.000,00
BELANJA OPERASI	1.999.644.800,00	1.825.962.000,00
Belanja Barang dan Jasa	201.562.000,00	139.962.000,00
Belanja Barang	48.962.000,00	47.262.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	48.962.000,00	47.262.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.700.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	462.000,00	462.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.300.000,00	1.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.000.000,00	21.000.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00
Belanja Jasa	106.500.000,00	76.700.000,00
Belanja Jasa Kantor	27.300.000,00	1.700.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.300.000,00	1.700.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	65.200.000,00	61.000.000,00
Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	1.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	1.500.000,00	0,00
Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	1.700.000,00	0,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	61.000.000,00	61.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	0,00	
Belanja Sewa Audio Visual	14.000.000,00	14.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.600.000,00	16.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.600.000,00	16.000.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.500.000,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.500.000,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	17.500.000,00	0,00
Belanja Hibah	1.798.082.800,00	1.686.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.798.082.800,00	1.686.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.458.082.800,00	1.458.082.800,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.458.082.800,00	1.458.082.800,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	340.000.000,00	227.917.200,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	340.000.000,00	227.917.200,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	34.701.000,00	26.500.000,00

BELANJA OPERASI	34.701.000,00	26.500.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>34.701.000,00</i>	<i>26.500.000,00</i>
Belanja Barang dan Jasa	34.701.000,00	26.500.000,00
Belanja Barang	23.701.000,00	18.500.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	23.701.000,00	18.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	221.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.480.000,00	1.500.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	16.000.000,00
Belanja Jasa	3.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	200.350.000,00	134.970.500,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	44.100.000,00	43.200.000,00
BELANJA OPERASI	44.100.000,00	43.200.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>44.100.000,00</i>	<i>43.200.000,00</i>
Belanja Jasa	44.100.000,00	43.200.000,00
Belanja Jasa Kantor	44.100.000,00	43.200.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.000.000,00	16.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.100.000,00	27.100.000,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	119.300.000,00	55.825.500,00
BELANJA OPERASI	119.300.000,00	55.825.500,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>119.300.000,00</i>	<i>55.825.500,00</i>
Belanja Barang	9.100.000,00	1.500.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.100.000,00	1.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.100.000,00	1.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000,00	0,00
Belanja Jasa	110.200.000,00	54.325.500,00
Belanja Jasa Kantor	110.200.000,00	54.325.500,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.200.000,00	54.200.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	125.500,00

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	36.950.000,00	35.945.000,00
BELANJA OPERASI	36.950.000,00	35.945.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>36.950.000,00</i>	<i>35.945.000,00</i>
Belanja Barang	375.000,00	375.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	375.000,00	375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.000,00	375.000,00
Belanja Jasa	36.575.000,00	35.570.000,00
Belanja Jasa Kantor	36.575.000,00	35.570.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.250.000,00	2.750.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.000.000,00	4.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.100.000,00	27.100.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.225.000,00	1.720.000,00
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.012.720.000,00	841.727.550,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	842.410.000,00	764.254.554,00
BELANJA OPERASI	842.410.000,00	764.254.554,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>842.410.000,00</i>	<i>764.254.554,00</i>
Belanja Barang	121.210.000,00	99.135.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	121.210.000,00	99.135.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.910.000,00	41.460.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	32.500.000,00	32.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.700.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.250.000,00	12.300.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00
Belanja Jasa	450.250.000,00	437.023.000,00
Belanja Jasa Kantor	261.150.000,00	250.923.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.600.000,00	1.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	190.000.000,00	189.500.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	60.000.000,00	60.000.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	550.000,00	423.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	189.100.000,00	186.100.000,00

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	39.600.000,00	39.600.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	103.500.000,00	100.500.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	270.950.000,00	228.096.554,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	270.950.000,00	228.096.554,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000,00	28.406.554,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	224.950.000,00	199.690.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	170.310.000,00	77.472.996,00
BELANJA OPERASI	170.310.000,00	77.472.996,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>170.310.000,00</i>	<i>77.472.996,00</i>
Belanja Barang	310.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	310.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	0,00
Belanja Jasa	120.000.000,00	68.205.236,00
Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	68.205.236,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	120.000.000,00	68.205.236,00
Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	9.267.760,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000,00	9.267.760,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	9.267.760,00

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI Rp
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.583.398.650,00	2.933.635.196,17
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	168.550.000,00	29.750.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	88.650.000,00	3.000.000,00
BELANJA OPERASI	88.650.000,00	3.000.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>88.650.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
Belanja Barang	450.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	450.000,00	0,00
Belanja Jasa	88.200.000,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor	88.200.000,00	3.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	79.200.000,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.000.000,00	3.000.000,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	79.900.000,00	26.750.000,00
BELANJA OPERASI	79.900.000,00	26.750.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>79.900.000,00</i>	<i>26.750.000,00</i>
Belanja Barang	1.500.000,00	750.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000,00	750.000,00
Belanja Jasa	78.400.000,00	26.000.000,00
Belanja Jasa Kantor	78.400.000,00	26.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.400.000,00	26.000.000,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.934.593.600,00	1.591.125.379,00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	512.700.000,00	444.325.424,00
BELANJA OPERASI	512.700.000,00	444.325.424,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>512.700.000,00</i>	<i>444.325.424,00</i>
Belanja Barang	50.000,00	50.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	50.000,00	50.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000,00	50.000,00
Belanja Barang dan Jasa	512.650.000,00	444.275.424,00
Belanja Jasa	312.650.000,00	271.500.000,00
Belanja Jasa Kantor	312.650.000,00	271.500.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	93.650.000,00	52.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	219.000.000,00	219.000.000,00
Belana Perjalanan Dinas	200.000.000,00	172.775.424,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000.000,00	172.775.424,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000,00	172.775.424,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.317.900.000,00	1.044.399.955,00
BELANJA OPERASI	1.317.900.000,00	1.044.399.955,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>1.317.900.000,00</i>	<i>1.044.399.955,00</i>
Belanja Barang	10.000.000,00	9.997.934,00
Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.997.934,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000,00	9.997.934,00
Belanja Jasa	1.197.900.000,00	927.550.000,00
Belanja Jasa Kantor	1.197.900.000,00	927.550.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.197.900.000,00	927.550.000,00
Belana Perjalanan Dinas	110.000.000,00	106.852.021,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.000.000,00	106.852.021,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.000.000,00	106.852.021,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	103.993.600,00	102.400.000,00
BELANJA OPERASI	103.993.600,00	102.400.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>103.993.600,00</i>	<i>102.400.000,00</i>
Belanja Jasa	103.993.600,00	102.400.000,00
Belanja Jasa Kantor	103.993.600,00	102.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	103.993.600,00	102.400.000,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.480.255.050,00	1.312.759.817,17
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	638.370.200,00	537.780.108,17
BELANJA OPERASI	616.370.200,00	515.780.108,17
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>293.000.000,00</i>	<i>195.030.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	293.000.000,00	195.030.000,00
Belanja Honorarium	293.000.000,00	195.030.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	293.000.000,00	195.030.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>323.370.200,00</i>	<i>320.750.108,17</i>
Belanja Barang	2.875.000,00	2.875.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.875.000,00	2.875.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.875.000,00	1.875.000,00
Belanja Jasa	70.495.200,00	69.300.000,00
Belanja Jasa Kantor	70.495.200,00	69.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	70.495.200,00	69.300.000,00
Belana Perjalanan Dinas	250.000.000,00	248.575.108,17
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000.000,00	248.575.108,17
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.000.000,00	248.575.108,17
BELANJA MODAL	22.000.000,00	22.000.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>22.000.000,00</i>	<i>22.000.000,00</i>
Belanja Modal Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	22.000.000,00	22.000.000,00
Belanja Modal Personal Computer	22.000.000,00	22.000.000,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	634.311.450,00	601.754.709,00
BELANJA OPERASI	539.611.450,00	507.204.909,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>102.000.000,00</i>	<i>97.500.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.000.000,00	97.500.000,00
Belanja Honorarium	102.000.000,00	97.500.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	102.000.000,00	97.500.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>437.611.450,00</i>	<i>409.704.909,00</i>
Belanja Barang	22.530.000,00	17.555.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	22.530.000,00	17.555.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.550.000,00	1.025.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.980.000,00	12.280.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	3.250.000,00
Belanja Jasa	377.895.200,00	363.413.554,00
Belanja Jasa Kantor	297.895.200,00	283.413.554,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	5.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.495.200,00	72.300.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	210.000.000,00	205.713.554,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	80.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	80.000.000,00	80.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.931.725,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.931.725,00

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.000.000,00	9.931.725,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	27.186.250,00	18.804.630,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.186.250,00	18.804.630,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.186.250,00	11.470.342,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	7.334.288,00
BELANJA MODAL	94.700.000,00	94.549.800,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>94.700.000,00</i>	<i>94.549.800,00</i>
Belanja Modal Komputer	94.700.000,00	94.549.800,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	94.700.000,00	94.549.800,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	30.000.000,00	29.997.750,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	19.700.000,00	19.669.200,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	45.000.000,00	44.882.850,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	207.573.400,00	173.225.000,00
BELANJA OPERASI	179.573.400,00	145.925.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>126.000.000,00</i>	<i>111.750.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.000.000,00	111.750.000,00
Belanja Honorarium	126.000.000,00	111.750.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	126.000.000,00	111.750.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>53.573.400,00</i>	<i>34.175.000,00</i>
Belanja Barang	1.675.000,00	1.675.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.675.000,00	1.675.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.675.000,00	1.675.000,00
Belanja Jasa	51.898.400,00	32.500.000,00
Belanja Jasa Kantor	51.898.400,00	32.500.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	5.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.498.400,00	27.100.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00	0,00
BELANJA MODAL	28.000.000,00	27.300.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>28.000.000,00</i>	<i>27.300.000,00</i>
Belanja Modal Komputer	28.000.000,00	27.300.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	28.000.000,00	27.300.000,00
Belanja Modal Personal Computer	28.000.000,00	27.300.000,00

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI Rp
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	33.953.222.464,00	29.841.291.704,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.926.400.005,00	11.461.098.642,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.437.661.405,00	11.010.258.642,00
BELANJA OPERASI	11.437.661.405,00	11.010.258.642,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>6.054.603.292,00</i>	<i>5.854.631.042,00</i>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.926.716.892,00	5.854.631.042,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.501.906.772,00	4.450.069.656,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.501.906.772,00	4.450.069.656,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	411.273.406,00	406.183.060,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	411.273.406,00	406.183.060,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	532.625.000,00	526.055.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	532.625.000,00	526.055.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	77.300.451,00	76.661.920,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	77.300.451,00	76.661.920,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	125.135.791,00	122.040.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	125.135.791,00	122.040.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	264.546.141,00	261.074.100,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	264.546.141,00	261.074.100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.811.257,00	12.480.261,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.811.257,00	12.480.261,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	118.074,00	67.045,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	118.074,00	67.045,00
<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>5.049.362.113,00</i>	<i>4.952.818.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.049.362.113,00	4.952.818.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.049.362.113,00	4.952.818.000,00
<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</i>	<i>205.809.600,00</i>	<i>202.809.600,00</i>
Belanja Honorarium	205.809.600,00	202.809.600,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	205.809.600,00	202.809.600,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	205.809.600,00	202.809.600,00
Belanja Barang dan Jasa	127.886.400,00	0,00

Belanja Jasa	51.393.600,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	51.393.600,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.393.600,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	76.492.800,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	76.492.800,00	0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	488.738.600,00	450.840.000,00
BELANJA OPERASI	488.738.600,00	450.840.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>8.160.000,00</i>	<i>8.160.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.160.000,00	8.160.000,00
Belanja Honorarium	8.160.000,00	8.160.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>480.578.600,00</i>	<i>442.680.000,00</i>
Belanja Barang	9.607.400,00	5.730.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.607.400,00	5.730.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	252.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.825.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.530.000,00	5.730.000,00
Belanja Jasa	470.971.200,00	436.950.000,00
Belanja Jasa Kantor	470.971.200,00	436.950.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	470.971.200,00	436.950.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.388.000,00	138.965.914,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	149.388.000,00	138.965.914,00
BELANJA OPERASI	149.388.000,00	138.965.914,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.836.000,00</i>	<i>1.836.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.836.000,00	1.836.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>147.552.000,00</i>	<i>137.129.914,00</i>
Belanja Barang	147.552.000,00	137.129.914,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	147.552.000,00	137.129.914,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	147.552.000,00	137.129.914,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	8.775.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	8.775.000,00

BELANJA OPERASI	25.000.000,00	8.775.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>8.775.000,00</i>
Belanja Jasa	25.000.000,00	8.775.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	8.775.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	8.775.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.754.444.800,00	4.703.099.964,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.521.550,00
BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.521.550,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>39.521.550,00</i>
Belanja Jasa	40.000.000,00	39.521.550,00
Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.521.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.000.000,00	39.521.550,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	202.676.000,00	182.168.230,00
BELANJA OPERASI	1.836.000,00	1.836.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.836.000,00</i>	<i>1.836.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.836.000,00	1.836.000,00
BELANJA MODAL	200.840.000,00	180.332.230,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>200.840.000,00</i>	<i>180.332.230,00</i>
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.840.000,00	180.332.230,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	200.840.000,00	180.332.230,00
Belanja Modal Mebel	172.800.000,00	152.410.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	28.040.000,00	27.922.230,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	922.728.800,00	828.220.100,00
BELANJA OPERASI	922.728.800,00	828.220.100,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>4.896.000,00</i>	<i>3.672.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.896.000,00	3.672.000,00
Belanja Honorarium	4.896.000,00	3.672.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.896.000,00	3.672.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>554.542.000,00</i>	<i>489.789.100,00</i>
Belanja Barang	554.542.000,00	489.789.100,00
Belanja Barang Pakai Habis	554.542.000,00	489.789.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	197.561.600,00	196.814.100,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	175.900.400,00	115.975.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	56.080.000,00	52.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	125.000.000,00	125.000.000,00
Belanja Jasa	363.290.800,00	334.759.000,00
Belanja Jasa Kantor	363.290.800,00	334.759.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.063.200,00	43.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.332.000,00	25.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	282.895.600,00	265.909.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.100.000,00	183.884.250,00
BELANJA OPERASI	205.100.000,00	183.884.250,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.740.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.740.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium	3.740.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.740.000,00	3.060.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>201.360.000,00</i>	<i>180.824.250,00</i>
Belanja Barang	201.360.000,00	180.824.250,00
Belanja Barang Pakai Habis	201.360.000,00	180.824.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	199.000.000,00	180.824.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.360.000,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	191.260.000,00	166.546.000,00
BELANJA OPERASI	191.260.000,00	166.546.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>191.260.000,00</i>	<i>166.546.000,00</i>
Belanja Barang	1.260.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.260.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.260.000,00	0,00
Belanja Jasa	190.000.000,00	166.546.000,00
Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	166.546.000,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	190.000.000,00	166.546.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.442.680.000,00	1.729.583.000,00
BELANJA OPERASI	2.442.680.000,00	1.729.583.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>4.572.000,00</i>	<i>4.572.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.572.000,00	4.572.000,00
Belanja Honorarium	4.572.000,00	4.572.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.572.000,00	4.572.000,00

Belanja Barang dan Jasa	2.438.108.000,00	1.725.011.000,00
Belanja Barang	1.483.548.000,00	1.195.095.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.483.548.000,00	1.195.095.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	50.000.000,00	48.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.433.548.000,00	1.146.895.000,00
Belanja Jasa	854.560.000,00	468.655.000,00
Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	29.912.000,00
Belanja Lembur	30.000.000,00	29.912.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	824.560.000,00	438.743.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	280.000.000,00	140.947.800,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	244.560.000,00	48.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Bantu	300.000.000,00	249.295.200,00
Belana Perjalanan Dinas	100.000.000,00	61.261.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.000.000,00	61.261.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00	61.261.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.700.000.000,00	1.528.578.634,00
BELANJA OPERASI	1.700.000.000,00	1.528.578.634,00
Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000,00	1.528.578.634,00
Belana Perjalanan Dinas	1.700.000.000,00	1.528.578.634,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000.000,00	1.528.578.634,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000.000,00	1.528.578.634,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	44.598.200,00
BELANJA OPERASI	28.608.060,00	23.848.200,00
Belanja Pegawai	1.836.000,00	1.836.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Barang dan Jasa	26.772.060,00	22.012.200,00
Belanja Barang	26.772.060,00	22.012.200,00
Belanja Barang Pakai Habis	26.772.060,00	22.012.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.422.060,00	22.012.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.000,00	0,00
BELANJA MODAL	21.391.940,00	20.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.391.940,00	20.750.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.391.940,00	20.750.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	15.391.940,00	15.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.391.940,00	15.000.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	5.750.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6.000.000,00	5.750.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.809.224.000,00	2.540.999.400,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.310.000.000,00	1.109.092.000,00
BELANJA OPERASI	5.252.000,00	4.572.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>5.252.000,00</i>	<i>4.572.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.252.000,00	4.572.000,00
Belanja Honorarium	5.252.000,00	4.572.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.252.000,00	4.572.000,00
BELANJA MODAL	1.304.748.000,00	1.104.520.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>1.304.748.000,00</i>	<i>1.104.520.000,00</i>
Belanja Modal Alat Angkutan	1.304.748.000,00	1.104.520.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.304.748.000,00	1.104.520.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	765.428.000,00	715.400.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	460.000.000,00	322.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	79.320.000,00	67.120.000,00
Pengadaan Mebel	150.000.000,00	145.539.000,00
BELANJA OPERASI	1.836.000,00	1.836.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.836.000,00</i>	<i>1.836.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium	1.836.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.836.000,00	1.836.000,00
BELANJA MODAL	148.164.000,00	143.703.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>148.164.000,00</i>	<i>143.703.000,00</i>
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.164.000,00	143.703.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	148.164.000,00	143.703.000,00
Belanja Modal Mebel	148.164.000,00	143.703.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	696.124.000,00	644.632.400,00
BELANJA OPERASI	3.060.000,00	3.060.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.060.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00
BELANJA MODAL	693.064.000,00	641.572.400,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>258.040.000,00</i>	<i>253.050.000,00</i>
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	258.040.000,00	253.050.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	177.000.000,00	174.850.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	177.000.000,00	174.850.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	81.040.000,00	78.200.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	48.040.000,00	46.200.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.000.000,00	32.000.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	275.000.000,00	274.022.400,00
Belanja Modal Alat Studio	275.000.000,00	274.022.400,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	195.000.000,00	194.022.400,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00
Belanja Modal Komputer	160.024.000,00	114.500.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	94.000.000,00	93.500.000,00
Belanja Modal Personal Computer	48.000.000,00	47.500.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	46.000.000,00	46.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	66.024.000,00	21.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	21.024.000,00	21.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	45.000.000,00	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	146.480.000,00
BELANJA OPERASI	150.000.000,00	146.480.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>2.996.000,00</i>	<i>2.196.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.996.000,00	2.196.000,00
Belanja Honorarium	2.996.000,00	2.196.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.996.000,00	2.196.000,00
Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	0,00
Belanja Barang	2.720.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	0,00
BELANJA MODAL	144.284.000,00	144.284.000,00
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>144.284.000,00</i>	<i>144.284.000,00</i>

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	144.284.000,00	144.284.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	144.284.000,00	144.284.000,00
Belanja Modal Pagar	144.284.000,00	144.284.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	503.100.000,00	495.256.000,00
BELANJA OPERASI	306.100.000,00	305.256.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>5.256.000,00</i>	<i>5.256.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.256.000,00	5.256.000,00
Belanja Honorarium	5.256.000,00	5.256.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.256.000,00	5.256.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>300.844.000,00</i>	<i>300.000.000,00</i>
Belanja Barang	844.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	844.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	844.000,00	0,00
Belanja Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	180.000.000,00	180.000.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000.000,00	180.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00
Belanja Sewa Tanaman	120.000.000,00	120.000.000,00
BELANJA MODAL	197.000.000,00	190.000.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>197.000.000,00</i>	<i>190.000.000,00</i>
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	197.000.000,00	190.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	197.000.000,00	190.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	197.000.000,00	190.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.478.000.000,00	1.385.624.498,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	248.000.000,00	219.400.000,00
BELANJA OPERASI	248.000.000,00	219.400.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>248.000.000,00</i>	<i>219.400.000,00</i>
Belanja Jasa	248.000.000,00	219.400.000,00
Belanja Jasa Kantor	248.000.000,00	219.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	244.984.000,00	219.400.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	3.016.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.230.000.000,00	1.166.224.498,00
BELANJA OPERASI	1.230.000.000,00	1.166.224.498,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>1.230.000.000,00</i>	<i>1.166.224.498,00</i>

Belanja Jasa	1.230.000.000,00	1.166.224.498,00
Belanja Jasa Kantor	1.230.000.000,00	1.166.224.498,00
Belanja Tagihan Telepon	160.000.000,00	158.809.614,00
Belanja Tagihan Listrik	1.062.500.000,00	1.002.971.084,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.500.000,00	4.443.800,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.320.799.600,00	3.983.143.279,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	273.000.000,00	151.412.927,00
BELANJA OPERASI	273.000.000,00	151.412.927,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>4.590.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.590.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium	4.590.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.590.000,00	3.060.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>268.410.000,00</i>	<i>148.352.927,00</i>
Belanja Barang	4.560.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	4.560.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.560.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	263.850.000,00	148.352.927,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.850.000,00	148.352.927,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	251.400.000,00	148.352.927,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Perorangan	12.450.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.152.110.000,00	1.523.010.799,00
BELANJA OPERASI	4.572.000,00	4.572.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>4.572.000,00</i>	<i>4.572.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.572.000,00	4.572.000,00
Belanja Honorarium	4.572.000,00	4.572.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.572.000,00	4.572.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>2.147.538.000,00</i>	<i>1.518.438.799,00</i>
Belanja Barang	7.200.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.560.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.640.000,00	0,00

Belanja Jasa	739.368.000,00	581.329.914,00
Belanja Jasa Kantor	539.368.000,00	381.935.900,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	155.990.400,00	137.497.200,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	195.873.600,00	182.486.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	187.504.000,00	61.952.700,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	200.000.000,00	199.394.014,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00	199.394.014,00
Belanja Pemeliharaan	1.400.970.000,00	937.108.885,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.400.970.000,00	937.108.885,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	267.750.000,00	195.422.686,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.133.220.000,00	741.686.199,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	643.912.000,00	537.340.545,00
BELANJA OPERASI	643.912.000,00	537.340.545,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.060.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>640.852.000,00</i>	<i>534.280.545,00</i>
Belanja Barang	60.000.000,00	59.999.900,00
Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.999.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	60.000.000,00	59.999.900,00
Belanja Jasa	223.569.200,00	164.335.000,00
Belanja Jasa Kantor	223.569.200,00	164.335.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198.569.200,00	139.375.000,00
Belanja Lembur	25.000.000,00	24.960.000,00
Belanja Pemeliharaan	357.282.800,00	309.945.645,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	357.282.800,00	309.945.645,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	113.602.800,00	88.442.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	70.000.000,00	61.199.850,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	78.680.000,00	65.985.640,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	95.000.000,00	94.317.255,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.251.777.600,00	1.771.379.008,00

BELANJA OPERASI	2.251.777.600,00	1.771.379.008,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>6.120.000,00</i>	<i>4.896.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.120.000,00	4.896.000,00
Belanja Honorarium	6.120.000,00	4.896.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.120.000,00	4.896.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>2.245.657.600,00</i>	<i>1.766.483.008,00</i>
Belanja Barang	117.600.000,00	62.599.250,00
Belanja Barang Pakai Habis	117.600.000,00	62.599.250,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.000.000,00	30.770.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	57.600.000,00	31.829.250,00
Belanja Jasa	859.437.600,00	670.170.208,00
Belanja Jasa Kantor	859.437.600,00	670.170.208,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.498.400,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	816.939.200,00	663.650.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000,00	6.520.208,00
Belanja Pemeliharaan	1.268.620.000,00	1.033.713.550,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	893.620.000,00	854.642.900,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	181.900.000,00	181.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	170.000.000,00	162.710.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	60.000.000,00	54.891.900,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	431.720.000,00	405.141.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.000.000,00	179.070.650,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	35.000.000,00	34.487.500,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	45.000.000,00	44.583.150,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	195.000.000,00	195.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	195.000.000,00	195.000.000,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.618.786.059,00	2.210.351.787,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.118.786.059,00	966.480.994,00
BELANJA OPERASI	1.118.786.059,00	966.480.994,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.118.786.059,00</i>	<i>966.480.994,00</i>
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.786.059,00	167.730.994,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.892.500,00	54.600.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.892.500,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.806.500,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.806.500,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.995.772,00	6.952.320,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.995.772,00	6.952.320,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	255.221,00	253.714,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	255.221,00	253.714,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	966,00	960,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	966,00	960,00
<i>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</i>	<i>950.000.000,00</i>	<i>798.750.000,00</i>
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	950.000.000,00	798.750.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	950.000.000,00	798.750.000,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000,00	101.070.000,00
BELANJA OPERASI	150.000.000,00	101.070.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>2.448.000,00</i>	<i>1.836.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.448.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium	2.448.000,00	1.836.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.448.000,00	1.836.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>147.552.000,00</i>	<i>99.234.000,00</i>
Belanja Barang	147.552.000,00	99.234.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	147.552.000,00	99.234.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	147.552.000,00	99.234.000,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.350.000.000,00	1.142.800.793,00
BELANJA OPERASI	1.350.000.000,00	1.142.800.793,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>1.350.000.000,00</i>	<i>1.142.800.793,00</i>
Belana Perjalanan Dinas	1.350.000.000,00	1.142.800.793,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.150.000.000,00	1.142.800.793,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000.000,00	1.142.800.793,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	200.000.000,00	0,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.068.980.000,00	1.879.309.381,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	504.960.000,00	450.060.000,00
BELANJA OPERASI	504.960.000,00	450.060.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.060.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>473.220.000,00</i>	<i>447.000.000,00</i>
Belanja Barang	473.220.000,00	447.000.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	473.220.000,00	447.000.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	468.900.000,00	447.000.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.320.000,00	0,00
Belanja Jasa	28.680.000,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	28.680.000,00	0,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.680.000,00	0,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	428.960.000,00	331.060.000,00
BELANJA OPERASI	428.960.000,00	331.060.000,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.060.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>425.900.000,00</i>	<i>328.000.000,00</i>
Belanja Barang	407.220.000,00	328.000.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	407.220.000,00	328.000.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	402.900.000,00	328.000.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.320.000,00	0,00
Belanja Jasa	18.680.000,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	18.680.000,00	0,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.680.000,00	0,00

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.135.060.000,00	1.098.189.381,00
BELANJA OPERASI	1.135.060.000,00	1.098.189.381,00
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.060.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium	3.060.000,00	3.060.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>1.132.000.000,00</i>	<i>1.095.129.381,00</i>
Belanja Barang	1.132.000.000,00	1.095.129.381,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.132.000.000,00	1.095.129.381,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.320.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.127.680.000,00	1.095.129.381,00
Penataan Organisasi	424.800.000,00	247.920.458,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	156.025.000,00	111.787.452,00
BELANJA OPERASI	156.025.000,00	111.787.452,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>156.025.000,00</i>	<i>111.787.452,00</i>
Belanja Barang	34.625.000,00	53.972.750,00
Belanja Barang Pakai Habis	34.625.000,00	53.972.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.200.000,00	6.132.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	440.000,00	440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.985.000,00	47.400.000,00
Belanja Jasa	82.400.000,00	18.900.000,00
Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	18.900.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	62.400.000,00	18.900.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00
Belana Perjalanan Dinas	39.000.000,00	18.914.702,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.000.000,00	18.914.702,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000,00	9.016.732,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.000.000,00	9.897.970,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	150.000.000,00	104.733.006,00
BELANJA OPERASI	150.000.000,00	104.733.006,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>104.733.006,00</i>
Belanja Barang	21.350.000,00	21.130.000,00

Belanja Barang Pakai Habis	21.350.000,00	21.130.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	440.000,00	220.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.910.000,00	20.910.000,00
Belanja Jasa	56.100.000,00	52.650.000,00
Belanja Jasa Kantor	56.100.000,00	52.650.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.100.000,00	52.650.000,00
Belana Perjalanan Dinas	72.550.000,00	30.953.006,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.550.000,00	30.953.006,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.550.000,00	8.880.553,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.000.000,00	30.953.006,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	55.425.000,00	14.000.000,00
BELANJA OPERASI	55.425.000,00	14.000.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>55.425.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
Belanja Barang	1.625.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.625.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.620.000,00	0,00
Belanja Jasa	24.800.000,00	14.000.000,00
Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00	14.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.800.000,00	14.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	19.725.000,00	17.400.000,00
BELANJA OPERASI	19.725.000,00	17.400.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>19.725.000,00</i>	<i>17.400.000,00</i>
Belanja Barang	925.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	925.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	915.000,00	0,00
Belanja Jasa	11.400.000,00	10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	10.000.000,00

Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.400.000,00	10.000.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.400.000,00	7.400.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.400.000,00	7.400.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.400.000,00	7.400.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	43.625.000,00	0,00
BELANJA OPERASI	43.625.000,00	0,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>43.625.000,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Barang	1.625.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.625.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.620.000,00	0,00
Belanja Jasa	32.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.000.000,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	0,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.377.400.000,00	1.282.003.381,00
Fasilitasi Keprotokolan	716.851.000,00	656.832.381,00
BELANJA OPERASI	716.851.000,00	656.832.381,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>716.851.000,00</i>	<i>656.832.381,00</i>
Belanja Barang	56.800.000,00	50.250.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	56.800.000,00	50.250.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.800.000,00	5.250.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.000.000,00	21.000.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	24.000.000,00	24.000.000,00
Belanja Jasa	660.051.000,00	606.582.381,00
Belanja Jasa Kantor	660.051.000,00	606.582.381,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	337.400.000,00	295.709.800,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	246.000.000,00	243.274.400,00
Belanja Tagihan Telepon	50.000.000,00	44.312.181,00
Belanja Lembur	26.651.000,00	23.286.000,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	81.300.000,00	69.275.000,00
BELANJA OPERASI	81.300.000,00	69.275.000,00

<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	81.300.000,00	69.275.000,00
Belanja Jasa	81.300.000,00	69.275.000,00
Belanja Jasa Kantor	81.300.000,00	69.275.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	81.300.000,00	69.275.000,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	579.249.000,00	555.896.000,00
BELANJA OPERASI	579.249.000,00	555.896.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	579.249.000,00	555.896.000,00
Belanja Barang	213.707.000,00	205.905.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	213.707.000,00	205.905.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	213.707.000,00	205.905.000,00
Belanja Jasa	365.542.000,00	349.991.000,00
Belanja Jasa Kantor	365.542.000,00	349.991.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	129.025.000,00	115.475.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000,00	30.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	199.000.000,00	198.000.000,00
Belanja Lembur	7.517.000,00	6.516.000,00

3.4 Analisa Keuangan

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang saat ini adalah belum maksimalnya penyerapan anggaran akan tetapi penyerapan anggaran mengalami peningkatan realisasi dibandingkan pada tahun 2021. Bahwa di tahun 2022, dari total belanja Rp 53.209.302.264,00 yang terealisasi hanya Rp 46.659.056.427,17 atau sekitar 87,69% Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021, dari total belanja Rp 47.845.628.624,00 yang terealisasi hanya Rp 42.113.321.755,00 atau sekitar 83,32%.

3.5 Analisis Ketersediaan SDM Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Sampai dengan bulan Desember tahun 2021 jumlah sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang berjumlah 84 orang. Jumlah tersebut dapat dilihat pada klasifikasi seperti pada tabel BAB I. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, jumlah SDM tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidak masih perlu menunggu data analisa beban kerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Saat ini, sebaran pegawai di sembilan bagian yang ada, belum merata sepenuhnya mengingat manajemen pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang sendiri belum tertata dengan baik.

Persoalan yang dihadapi saat ini antara lain; tidak semua pegawai di masing-masing unit konsisten dalam berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Masih banyak permasalahan pada aspek kedisiplinan yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Permasalahan lain, produktivitas pejabat fungsional dan struktural pun masih perlu dipacu dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan berlandaskan pada Renstra yang telah disepakati.

Kalau ditinjau dari aspek kompetensi pegawai, masih ada beberapa pegawai khususnya fungsional maupun struktural yang penempatannya belum sesuai dengan pola penempatan pegawai. Alhasil, beberapa fungsional maupun struktural belum sepenuhnya mampu memberikan kemampuan terbaik dalam mendukung kinerja organisasi. Hal ini mesti diantisipasi dengan pola penempatan pegawai dan pola mutasi yang lebih baik. Sebaran pegawai yang tidak merata, perlu dipertimbangkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut,

maka sudah selayaknya setiap bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang menyusun uraian tugas pegawai agar tercipta pola kerja dan pembagian tugas yang terbagi.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah, pengisian pegawai baru di bagian-bagian yang ada. Kondisi saat ini, pegawai baru yang banyak ditempati di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang masih didominasi tenaga teknis S1. Padahal dalam kondisi ideal saat ini, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang memerlukan tenaga yang bisa diberdayakan dalam aspek-aspek teknis dengan dukungan tenaga sarjana sehingga tugas-tugas bagian dapat lebih efektif dari waktu ke waktu.

3.6 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Sebagai Bahan Penentu Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023

Hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2022, telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Beranjak dari kenyataan itu, sudah selayaknya ada peningkatan yang lebih baik yang berkesinambungan atas pelaporan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Hal tersebut sejatinya harus dimulai dari level bagian. Konsep pembekalan terhadap pejabat yang menangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bagian-bagian sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kendati demikian, masih ada kendala teknis yang menjadi sandungan dalam pencapaian pelaporan yang baik dan benar. Indikator-indikator penting dalam instrumen pelaporan baik menyangkut daya dukung renstra/program kegiatan bagian dalam menyokong pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang secara bertahap harus disempurnakan. Tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa

konsep akuntabilitas ini harus terus mengakar dan benar-benar mengalir dalam urat nadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2022 hampir sama dengan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2021, digambarkan sebagai berikut:

1. Renstra OPD yang lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) sehingga akan lebih mengarahkan kepada kondisi yang diinginkan. Sementara itu, dokumen perencanaan kinerja (RPJM, Renstra dan RKT) agar digunakan dalam penganggaran dan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja.
2. Menyusun dokumen perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya kewajiban setiap satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelumnya mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap tahun satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcomes* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran
4. meng-*upload* dokumen AKIP (RPJMD, IKU, RKT, Cascading, Perkin, Rencana Aksi) Kota Pangkalpinang ke dalam website resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh OPD yang mengelola website dimaksud, serta dokumen AKIP OPD (Renstra, IKU, RKT, Cascading, Perkin, Rencana Aksi, Laporan Kinerja) ke dalam website resmi masing-masing OPD.

5. Menyempurnakan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengenai capaian target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian kinerja serta informasi mengenai berbagai perbandingan capaian kinerja dengan mendeskripsikan capaian indikator apakah berhasil mencapai target maupun gagal mencapai target dengan penjelasannya.
6. Menyusun pedoman evaluasi/reviu kinerja di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang diatur dalam Permenpan 53 Tahun 2014 serta melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran pemerintah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1	-	040101	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) (Dengan Satuan:Nilai)	68,430	33.825.336.064	70	30.070.707.257	100	88,900	Kepala Bagian Organisasi
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Organisasi
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase pelayanan BLUD yang ditingkatkan (Dengan Satuan:%)	100		0		0		Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Organisasi
				Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja akuntabel dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	90		90		100		Kepala Bagian Pemerintahan
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5						9	
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran. (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Umum
				Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Organisasi
				Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2		040101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan (Dengan Satuan:%)	100	11.798.513.605	100	11.460.558.642	100	97,136	Sub Koordinator Bagian Keuangan
3		040101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	85	11.309.775.005	374	11.009.718.642	100	97,347	Sub Koordinator Bagian Keuangan
4		040101202008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran (Dengan Satuan:Laporan)	1	488.738.600	1	450.840.000	100	92,246	Sub Koordinator Bagian Keuangan
5		040101203	Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah (Dengan Satuan:%)	100	149.388.000	100	138.965.914	100	93,023	Sub Koordinator Bagian Keuangan
6		040101203002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset SKPD yang diamankan (Dengan Satuan:Unit)	1	149.388.000	1	138.965.914	100	93,023	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
7		040101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000	50	8.775.000	100	35,100	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
8		040101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi (Dengan Satuan:Orang)	6	25.000.000	3	8.775.000	50	35,100	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
9		040101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi umum (Dengan Satuan:%)	100	5.754.444.800	82,660	4.703.099.964	100	81,730	Sub Koordinator Bagian Keuangan
10		040101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Dengan Satuan:Unit)	10	40.000.000	10	39.521.550	100	98,804	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
11		040101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	202.676.000	10	182.168.230	100	89,882	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8			9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		
12		040101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	2	922.728.800	2	828.220.100	100	89,758	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
13		040101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan:Set)	2	205.100.000	2	183.884.250	100	89,656	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
14		040101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dengan Satuan:Koran)	10	191.260.000	16	166.546.000	100	87,078	Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan	
15		040101206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis fasilitasi kunjungan tamu (Dengan Satuan:Jenis)	2	2.442.680.000	3	1.729.583.000	100	70,807	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
16		040101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Jenis)	2	1.700.000.000	4	1.528.578.634	100	89,916	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
17		040101206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD (Dengan Satuan:Jenis)	2	50.000.000	4	44.598.200	100	89,196	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	
18		040101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:%)	100	2.809.224.000	100	2.585.974.400	100	92,053	Sub Koordinator Bagian Keuangan	
19		040101207002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1.310.000.000	3	1.109.092.000	100	84,664	Sub Koordinator Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
20		040101207005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Dengan Satuan:Set)	1	150.000.000	1	145.539.000	100	97,026	Sub Koordinator Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
21		040101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Dengan Satuan:Set)	2	696.124.000	4	689.607.400	100	99,064	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
22		040101207009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	1	150.000.000	1	146.480.000	100	97,653	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
23		040101207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Dengan Satuan:Set)	2	503.100.000	4	495.256.000	100	98,441	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
24		040101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa (Dengan Satuan:%)	100	1.478.000.000	100	1.385.624.498	100	93,750	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
25		040101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan (Dengan Satuan:Surat)	2	248.000.000	4	219.400.000	100	88,468	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	
26		040101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	3	1.230.000.000	3	1.166.224.498	100	94,815	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		040101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:%)	100	5.320.799.600	100	4.178.143.279	100	78,525	Sub Koordinator Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
28		040101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	6	273.000.000	13	151.412.927	100	55,463	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
29		040101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	2.152.110.000	17	1.523.010.799	85	70,768	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
30		040101209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	643.912.000	7	537.340.545	100	83,449	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
31		040101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	2.251.777.600	4	1.966.379.008	100	87,326	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
32		040101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	2.618.786.059	100	2.210.351.787	100	84,404	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
33		040101211001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	2	1.118.786.059	4	966.480.994	100	86,387	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
34		040101211002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dan atribut kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan (Dengan Satuan:Stell)	5	150.000.000	4	101.070.000	80	67,380	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
35		040101211004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	1	1.350.000.000	1	1.142.800.793	100	84,652	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
36		040101212	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	2.068.980.000	100	1.879.309.381	100	90,833	Sub Koordinator Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
37		040101212001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	1	504.960.000	2	450.060.000	100	89,128	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
38		040101212002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	1	428.960.000	2	331.060.000	100	77,177	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
39		040101212003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	1	1.135.060.000	2	1.098.189.381	100	96,752	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
40		040101213	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan (Dengan Satuan:%)	100	424.800.000	100	237.901.011	100	56,003	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8			9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		
41		040101213001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun (Dengan Satuan:Laporan)	2	156.025.000	1	92.887.452	50	59,534	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan	
42		040101213002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	33	150.000.000	33	113.613.559	100	75,742	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana	
43		040101213003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	55.425.000	1	14.000.000	50	25,259	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
44		040101213004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	2	19.725.000	1	17.400.000	50	88,213	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana	
45		040101213005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:Laporan)	1	43.625.000	0	0	0	0	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
46		040101214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara/kegiatan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	1.377.400.000	100	1.282.003.381	100	93,074	Sub Koordinator Protokol	
47		040101214001	Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Acara/Kegiatan)	500	716.851.000	688	656.832.381	100	91,627	Sub Koordinator Protokol	
48		040101214002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Acara/Kegiatan)	400	81.300.000	616	69.275.000	100	85,209	Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan	
49		040101214003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Acara/Kegiatan)	500	579.249.000	688	555.896.000	100	95,968	Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									94,118	88,900		
PREDIKAT KINERJA									ST	T		
50	-	040102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	14.792.567.550	75	14.137.047.506	75	95,569	Kepala Bagian Pemerintahan	
				Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Hukum	
				Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Pemerintahan	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8			9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional (Dengan Satuan:Kebijakan)	1		0		0		Kepala Bagian Hukum	
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Pemerintahan	
				Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Hukum	
				Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Pemerintahan	
51		040102201	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:%)	100	150.850.000	20	97.615.000	100	64,710	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan	
52		040102201001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	67.200.000	1	63.540.000	100	94,554	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan	
53		040102201002	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kewilayahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	14.000.000	1	3.375.000	100	24,107	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan	
54		040102201003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan LPPD, RLPPD, SPM, LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan (Dengan Satuan:Laporan)	4	69.650.000	4	30.700.000	100	44,078	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan	
55		040102202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	13.428.647.550	100	13.062.734.456	100	97,275	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat	
56		040102202001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah jenis fasilitasi bina mental spiritual yang dikelola (Dengan Satuan:Jenis)	8	11.394.301.750	10	11.165.032.456	100	97,988	Sub Koordinator Bina Mental Spritual	
57		040102202002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.999.644.800	1	1.866.702.000	100	93,352	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	
58		040102202003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan UKS yang dibina (Dengan Satuan:Laporan)	1	34.701.000	1	31.000.000	100	89,335	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat	
59		040102203	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelayanan hukum yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	200.350.000	100	134.970.500	100	67,367	Sub Koordinator Bantuan Hukum	
60		040102203001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dihasilkan (Dengan Satuan:produk hukum)	335	44.100.000	416	43.200.000	100	97,959	Sub Koordinator Perundang-Undangan	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
61		040102203002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi (Dengan Satuan:kasus hukum)	6	119.300.000	5	55.825.500	83,333	46,794	Sub Koordinator Bantuan Hukum
62		040102203003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah publikasi produk hukum (Dengan Satuan:dokumen)	70	36.950.000	94	35.945.000	100	97,280	Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi
63		040102204	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	1.012.720.000	100	841.727.550	100	83,116	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
64		040102204001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerja sama yang difasilitasi (Dengan Satuan:kerjasama)	10	842.410.000	10	764.254.554	100	90,722	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
65		040102204002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah rencana kerja sama luar negeri yang difasilitasi (Dengan Satuan:rencana kerjasama)	1	170.310.000	1	77.472.996	100	45,489	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									66,667	95,569	
PREDIKAT KINERJA									S	ST	
66	-	040103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	3.583.398.650	75	2.933.635.196	75	81,867	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
				Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		88		88		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		50		50		Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian. (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:%)	100		75		75		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
67		040103201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:%)	100	168.550.000	75	29.750.000	100	17,651	Sub Koordinator Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
68		040103201001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Laporan)	4	88.650.000	2	3.000.000	50	3,384	Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD
69		040103201002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	4	79.900.000	4	26.750.000	100	33,479	Sub Koordinator Ekonomi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
70		040103202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	1.934.593.600	75	1.591.125.379	100	82,246	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan
71		040103202001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen program pembangunan yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	512.700.000	1	444.325.424	100	86,664	Sub Koordinator Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
72		040103202002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.317.900.000	1	1.044.399.955	100	79,247	Sub Koordinator Pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan
73		040103202003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	1	103.993.600	1	102.400.000	100	98,468	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan
74		040103203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terpenuhinya pengelolaan pengadaan barang dan jasa (Dengan Satuan:%)	100	1.480.255.050	88	1.312.759.817	100	88,685	Sub Koordinator Pengelolaan Barang dan Jasa
75		040103203001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terkelola (Dengan Satuan:Paket)	90	638.370.200	90	537.780.108	100	84,243	Sub Koordinator Pengelolaan Barang dan Jasa
76		040103203002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terkelola (Dengan Satuan:Paket)	90	634.311.450	90	601.754.709	100	94,867	Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
77		040103203003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa (Dengan Satuan:Pembinaan)	3	207.573.400	10	173.225.000	100	83,452	Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									73,000	81,867	
PREDIKAT KINERJA									S	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)									82,438	88,779	
PREDIKAT KINERJA									T	T	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Kondisi covid 19 yang sudah menurun sehingga pelaksanaan kegiatan sudah maksimal							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian adanya penundaan pemilihan Direktur PDAM - Pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri ada hambatan disebabkan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri karena ada aturan untuk tidak ke luar negeri untuk antisipasi pandemi covid 19 yang masih ada - Sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum disebabkan berkurangnya jadwal persidangan kasus yang ditangani sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal - Sub kegiatan pelaksanaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi otonomi daerah dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran - Pendidikan dan pelatihan pegawai belum maksimal karena diklat yang dibutuhkan belum ada penjadwalan 							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:											

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 02-01-2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG



RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.
NIP.196401271993032001

KOTA PANGKALPINANG

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2022, yaitu:

- Dari 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang diuraikan dalam 5 (lima) indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator sudah sesuai target dan 3 (tiga) indikator belum rilis capaian kinerja. **Secara umum ini menggambarkan capaian yang baik dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2022.**
- Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang saat ini adalah belum maksimalnya komitmen dalam pencapaian kinerja.

4.2 PERMASALAHAN

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama disebabkan adanya faktor belum adanya jadwal kegiatan yang tepat sesuai skala prioritas dan kurangnya pelaksanaan pengawasan di lapangan. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran belum seluruhnya dapat dilaksanakan hal ini terutama disebabkan kurangnya koordinasi untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

4.3 SOLUSI

Dari kondisi yang ditemukan tersebut dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan guna tercapainya kondisi seperti yang diinginkan sebelumnya :

- Komitmen pimpinan dan aparatur di Sekretariat Daerah sangat diperlukan dalam pencapaian kinerja yang diaplikasikan dalam penerapan program serta kegiatan di masing-masing bagian yang berorientasi pada *outcomes*.
- Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang harus mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan rencana kegiatan dan pada pelaksanaan pembangunan sehingga menghasilkan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Perlunya pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang melakukan analisis perencanaan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dengan pengawasan langsung sehingga menghasilkan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat waktu.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah hendaknya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dapat terwujud.